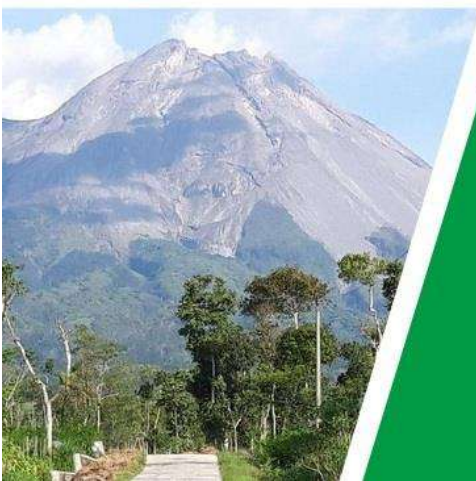


**TAHUN
2020**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY

Jl. Argulobang No.19, Baciro, Yogyakarta
Telp. : (0274) 588518, Fax. : (0274) 512447
Website : dlhk.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2020 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemi COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2021

Pt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DIY



Ir. HANANTO HADI PURNOMO, M.Sc.

NIP. 19610223 198902 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2020 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas”:
 - Diukur dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup (Capaian IKLH tahun N yang tercapai/target IKLH pada tahun akhir RPJMD x 100%).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) Program, yakni Program Pengkajian dan Penaatan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi dan Konservasi Sumber Daya Alam, dan Program Pengelolaan Persampahan Regional
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2020 sebesar 94,39 %; sampai dengan bulan Desember 2020 terealisasi 93,12 %. Dengan demikian capaian ini belum memenuhi target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) sebesar 98,65 %
 - Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2019 sebesar 92,29 %, capaian tahun 2020 meningkat 0,83 %.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya nilai produksi kehutanan”:
 - Diukur dengan indikator nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY (nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK))
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yakni Program Pengembangan Pembibitan Kehutanan, Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan, Program Pengelolaan Hutan Konservasi, serta Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2020 adalah sebesar 749.080 juta rupiah. Sehubungan dengan proses perhitungan yang belum final dari BPS DIY, maka realisasi masih menggunakan proyeksi sebesar 1.103.535,8 juta

rupiah. Capaian ini terhitung telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 147,24 %.

- Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2019 sebesar 1.086.968,1 juta rupiah, capaian tahun 2020 meningkat 1,52 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan
2. Pencemaran air
3. Pengelolaan sampah
4. Kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan tanpa izin
5. Pengarusutamaan pertumbuhan ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan ekonomi
6. Resolusi permasalahan tenurial
7. Penyediaan bibit kehutanan yang berkualitas

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.....	10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	12
1.4 Isu-isu Strategis.....	15
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	17
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2019.....	27
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	28
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	28
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	29
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2020.....	31
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	35
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020.....	37
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2020.....	45
3.3. Realisasi Anggaran.....	50
3.4. Inovasi.....	52
BAB IV PENUTUP.....	55
LAMPIRAN.....	60

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	19
Tabel I.2 Sarana-Prasarana.....	24
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan 2020	26
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan 2020	26
Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2019	27
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2017-2022....	29
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	29
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	32
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020	33
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2020.....	35
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	37
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2020.....	38
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	38
Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1	39
Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	40
Tabel III.6 Capaian IKLH DIY Tahun 2018, 2019 dan 2020 dibandingkan dengan IKLH Nasional Tahun 2019.....	40
Tabel III.7 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air di DIY	41
Tabel III.8 Data Indeks Kualitas Udara DIY tahun 2020	42
Tabel III.9 Hasil Perhitungan IKTL DIY.....	43
Tabel III.10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	46
Tabel III.11 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	46
Tabel III.12 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu DIY Tahun 2010 - 2019.....	47
Tabel III.13 Komponen Penyumbang PDRB yang berasal dari Urusan Kehutanan	48
Tabel III.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020	51

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	12
Gambar I.4. Proporsi pegawai Dinas Induk berdasarkan tingkat pendidikan.....	17
Gambar I.5. Sebaran Usia Pegawai Dinas Induk.....	17
Gambar I.6. Proporsi pegawai Balai KPH berdasarkan tingkat pendidikan.....	18
Gambar I.7. Sebaran Usia Pegawai KPH	18
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK,Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	36
Gambar II.2. Sinta KLH.....	36
Gambar III.1. Preparasi sampel kualitas air di salah satu titik pantau Sungai Gajahwong.....	44
Gambar III.1. Preparasi sampel kualitas air di salah satu titik pantau Sungai Gajahwong.....	44
Gambar III.2. Pelaksanaan Tebang Pilih di RPH Semanu Tahun 2020.....	50

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2019*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

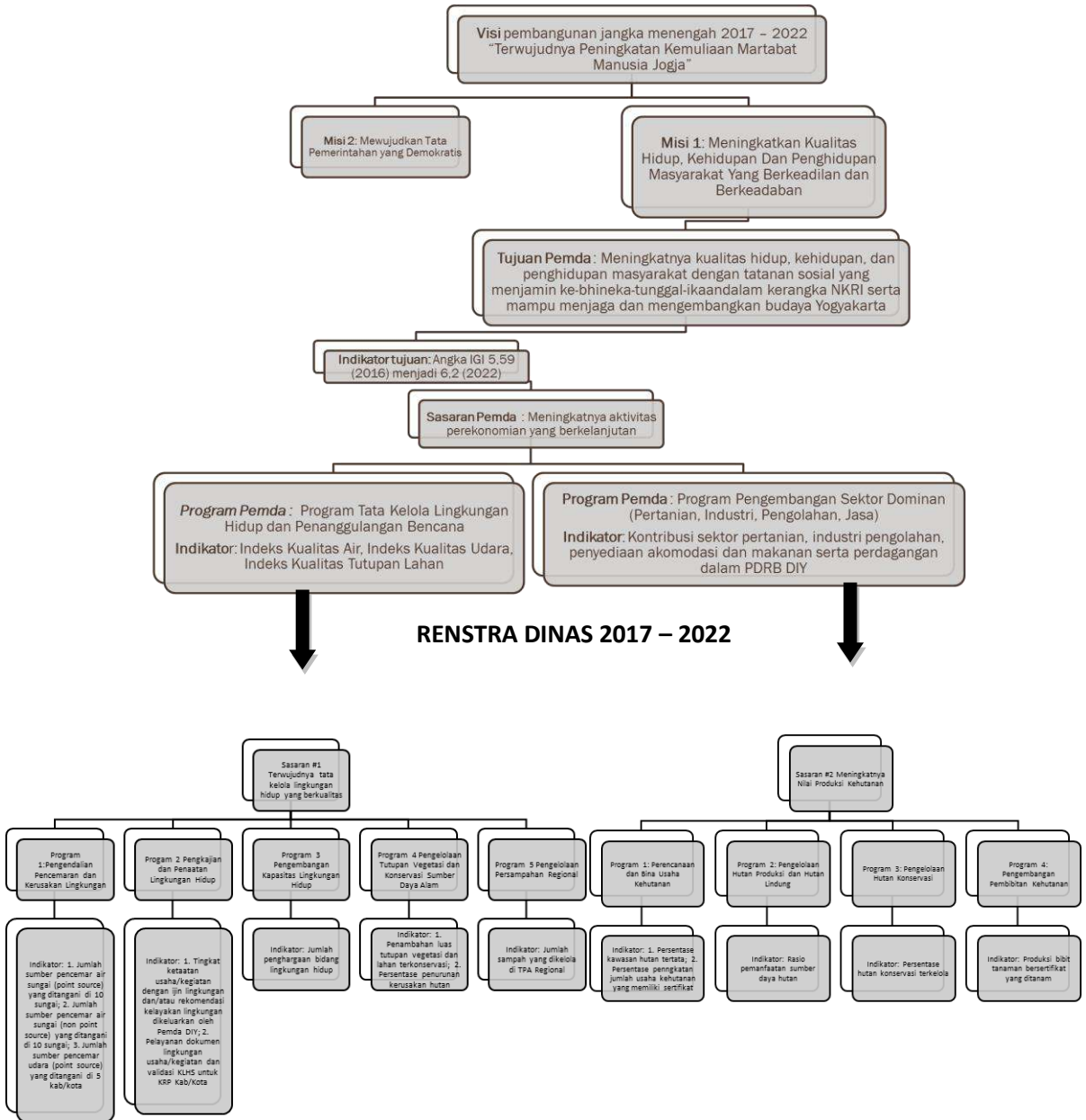
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja

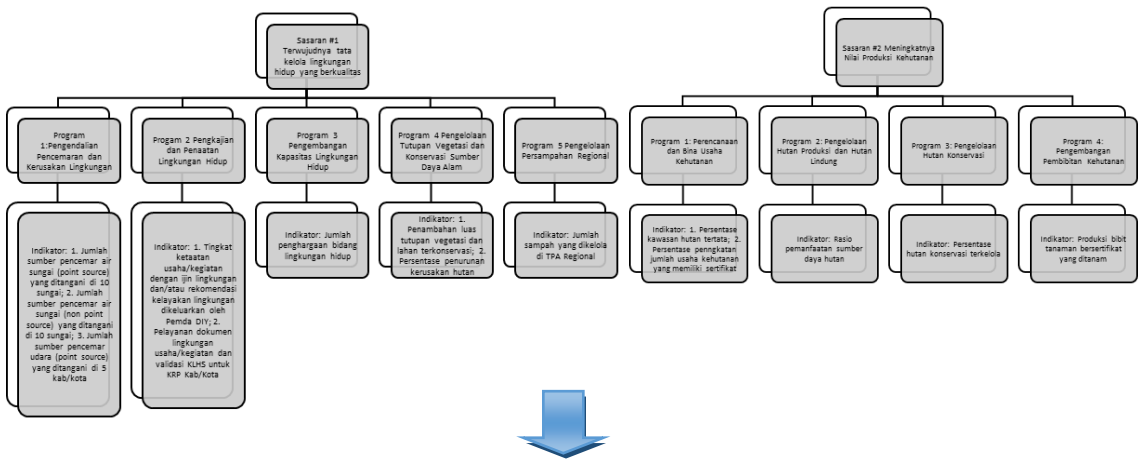
RPJMD DIY 2017 - 2022



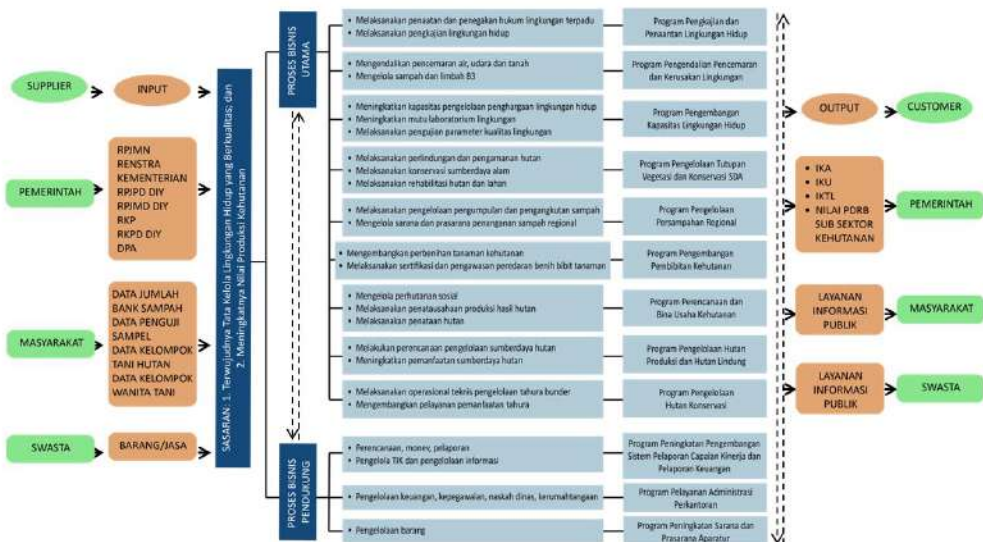
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

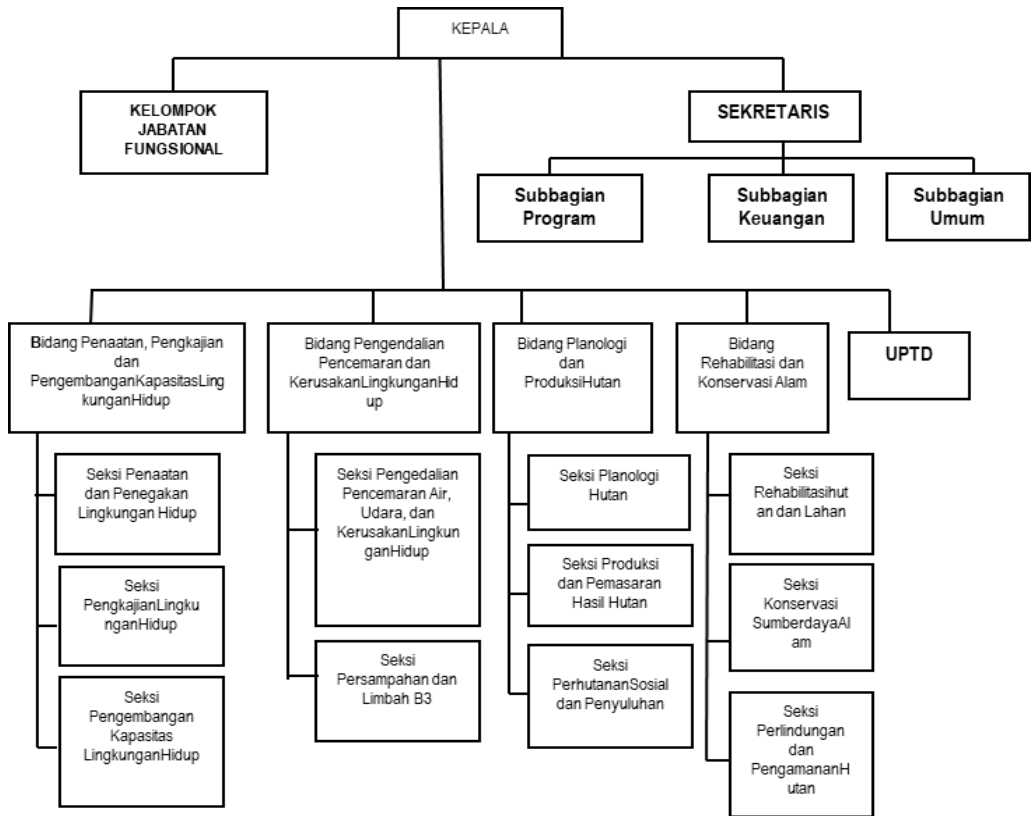
Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY



PETA PROSES BISNIS PENCAPAIAN SASARAN KINERJA OPD





Sumber: Perdais DIY No. 1 Tahun 2018 dan Pergub DIY No. 59 Tahun 2018


1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Adapun fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagai berikut

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. penyelenggaraan penataan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
4. penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5. penyelenggaraan planologi dan produksi hutan;
6. penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi alam;
7. pengelolaan persampahan;
8. pengelolaan laboratorium lingkungan;
9. pengelolaan perbenihan kehutanan;
10. pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
11. pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
12. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
13. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
14. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
15. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.



Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Sekretaris <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubag Keuangan 2) Kasubag Umum 3) Kasubag Program 3. Kabid Pnaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasi Pnaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan 2) Kasi Pengkajian Lingkungan Hidup 3) Kasi Pengembangan Kapasitas 4. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup 2) Kasi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 5. Kabid Planologi dan Produksi Hutan <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasi Planologi Hutan 2) Kasi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan 3) Kasi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan 6. Kabid Rehabilitasi dan Konservasi Alam <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasi Rehabilitasi dan Konservasi alam 2) Kasi Konservasi Sumber Daya Alam 3) Kasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan 7. Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubag Tata Usaha 2) Kasi Perencanaan dan Reboisasi 3) Kasi Pemanfaatan Hutan 8. Kepala Balai Taman Hutan Raya Bunder <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubag Tata usaha 2) Kasi Perencanaan dan Restorasi 3) Kasi Pemanfaatan 9. Kepala Balai Laboratorium Lingkungan <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubag Tata Usaha 2) Kasi Pengendali Mutu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah Kasubag Keuangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendahara 2) Pengelola Gaji 3) Pengadministrasi Keuangan 4) Pengelola Akuntansi 5) Verifikator Data Laporan Keuangan 2. Dibawah Kasubag Umum <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Barang Milik Negara 2) Pengadministrasi Kepegawaian 3) Pengadministrasi Persuratan 4) Pranata Kearsipan 5) Teknisi Sarana dan Prasarana 6) Pengadministrasi Umum 7) Pengemudi 3. Dibawah Kasubag Program <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Pengelola Sistem dan Jaringan 4. Dibawah Kasi Pnaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Lingkungan Hidup 2) Pengadministrasi Umum 5. Dibawah Kasi Pengkajian Lingkungan Hidup <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Lingkungan Hidup 6. Dibawah Kasi Pengembangan Kapasitas <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyuluh Lingkungan Hidup 7. Dibawah Kasi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Sistem Mutu dan Lingkungan 2) Pengadministrasi Umum 8. Dibawah Kasi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Sistem Mutu dan Lingkungan 9. Dibawah Kasi Planologi Hutan <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Pengembangan Hutan 2) Pengadministrasi Umum 10. Dibawah Kasi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Pasar Hasil Hutan 11. Dibawah Kasi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Permodalan dan Aneka Usaha Perhutanan Sosial 12. Dibawah Kasi Rehabilitasi dan Konservasi alam <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Hutan dan Lahan 2) Pengadministrasi Umum 13. Dibawah Kasi Konservasi Sumber Daya Alam <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi 14. Dibawah Kasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Pengamanan Lingkungan 15. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai KPH <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pengadministrasi Keuangan

<ul style="list-style-type: none"> 3) Kasi Pengujian 10. Kepala Balai Perbenihan Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kasubag Tata Usaha 2) Kasi Pengembangan Perbenihan 3) Kasi Sertifikasi Benih dan Kehutanan 11. Kepala Balai Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> 1) Kasubag Tata Usaha 2) Kasi Pengumpulan dan Pengangkutan 3) Kasi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir 12. Penyuluh Kehutanan Penyelia 13. Penyuluh Kehutanan Muda 14. Penyuluh Kehutanan Madya 15. Penyuluh Kehutanan Pertama 16. Polisi Kehutanan Penyelia 17. Pelaksana 18. Pengendali Ekosistem Hutan Muda 19. Pengawas Lingkungan Hidup Muda 20. Calon Pengawas Lingkungan Hidup 21. Pengendali Dampak Lingkungan Madya 22. Polisi Kehutanan Terampil 23. Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama 24. Perekayasa Pertama 25. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama 	<ul style="list-style-type: none"> 3) Pengadministrasi Kepegawaian 4) Teknisi Sarana dan Prasarana 5) Bendahara 6) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 7) Pengelola Akuntansi 8) Pengelola Gaji 9) Pengelola Barang Milik Negara 10) Pranata Kearsipan 11) Verifikator Data Laporan Keuangan 16. Dibawah Kasi Perencanaan dan Reboisasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Koordinator 2) Analis Pengembangan Hutan 17. Dibawah Kasi Pemanfaatan Hutan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha Perhutanan Sosial 2) Analis Pasar Hasil Hutan 18. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai TAHURA Bunder <ul style="list-style-type: none"> 1) Teknisi Sarana dan Prasarana 2) Pengadministrasi Kepegawaian 3) Pengadministrasi Persuratan 4) Pengelola Barang Milik Negara 5) Pengadministrasi Keuangan 19. Dibawah Kasi Perencanaan dan Restorasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Analis Rehabilitasi dan Konservasi 20. Dibawah Kasi Pemanfaatan <ul style="list-style-type: none"> 1) Petugas Keamanan 2) Analis Pengembangan Hutan 21. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Laboratorium Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Teknisi Sarana dan Prasarana 3) Pengadministrasi Kepegawaian 4) Pengadministrasi Keuangan 22. Dibawah Kasi Pengendali Mutu <ul style="list-style-type: none"> 1) Analis Penjamin Mutu 2) Analis Laboratorium 23. Dibawah Kasi Pengujian <ul style="list-style-type: none"> 1) Analis Pengujian 2) Analis Lingkungan Hidup 24. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Perbenihan Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Teknisi Sarana dan Prasarana 3) Pengadministrasi Kepegawaian 4) Pengadministrasi Keuangan 5) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 25. Dibawah Kasi Pengembangan Perbenihan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Teknologi Perbenihan 26. Dibawah Kasi Sertifikasi Benih dan Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Analis Benih 27. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Pengelola Akuntansi
--	--

	<p>28. Dibawah Kasi Pengumpulan dan Pengangkutan</p> <p>1) Pengawas Lapangan Angkutan Sampah</p> <p>2) Pengelola Sampah</p> <p>29. Dibawah Kasi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir</p> <p>1) Pengelola Sampah</p>	
--	--	--

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan sinergi dan efektivitas upaya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas” dan “Mewujudkan tata kelola hutan lestari,” antara lain sebagai berikut:

1. Alih Fungsi Lahan

Berkurangnya lahan terbuka menjadikan keseimbangan siklus hidrologi menjadi terganggu. Hal ini di satu sisi menjadi ancaman bencana banjir sebagai akibat meningkatnya aliran permukaan. Sementara di sisi lain akibat berkurangnya resapan air ke dalam tanah maka menimbulkan ancaman bencana kekeringan.

2. Pencemaran Air

Berdasarkan perhitungan dengan metode indeks pencemaran dan metode storet dihubungkan dengan kualitas air sungai hasil ketetapan Gubernur DIY diketahui bahwa pencemaran air di 10 sungai di DIY berada dalam kondisi tercemar. Parameter bakteri koli tinja (*Fecal coliform*) dan total koli (*Total coliform*) memiliki kontribusi besar sebagai sumber pencemar. Tingginya parameter bakteri koli menunjukkan bahwa limbah domestik belum tertangani dengan baik.

3. Pengelolaan Sampah

Penggunaan plastik dan bahan non organik lainnya yang belum terkendali (belum ada regulasi, insentif/disinsentif maupun gerakan masif terkait pengurangan sampah jenis tersebut) mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di TPST Piyungan. Selain pendekatan preventif berupa sistem pengelolaan sampah melalui prinsip 3R, perlu adanya penerapan pengelolaan sampah di TPST Piyungan yang mengadopsi teknologi tinggi namun tetap ramah lingkungan.

4. Kerusakan Lahan Akibat Aktivitas Penambangan Tanpa Izin

Kegiatan tambang tanpa izin yang terjadi di empat kabupaten di DIY didominasi oleh pertambangan batu, pasir, dan tanah urug. Pada masing-masing area tambang meninggalkan bekas-bekas lubang galian dan berpotensi menyebabkan terjadinya longsor. Bekas-bekas galian menjadikan lahan area tambang menjadi rusak dan juga menyebabkan kerusakan fasilitas umum, misalnya jalan di sekitar area tambang sebagai akibat dilalui truk-truk pembawa hasil galian.

5. Pengarusutamaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Hingga tahun 2020, perhitungan nilai PDRB subsektor kehutanan masih bertumpu pada produksi hasil hutan kayu dan non kayu. Hal ini mengesankan bahwa kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB masih bersifat ekstraktif. Padahal, pada kenyataannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan jasa lingkungan hutan kawasan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan nilai PDRB subsektor kehutanan dengan strategi dan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau memastikan struktur perekonomian daerah dapat tersaji secara lebih realistis dan berkelanjutan.

6. Resolusi Permasalahan Tenurial

Konflik tenurial pada areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektivitas tata kelola hutan di DIY. Ketidaksiapan calon lahan pengganti untuk proses tukar menukar kawasan hutan, penyerobotan lahan akibat kondisi sosial masyarakat sekitar kawasan bergantung terhadap hutan, penggunaan lahan tanpa izin, dan aksi sabotase terhadap tanda batas kawasan hutan merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam menyelesaikan berbagai konflik tenurial tersebut di atas. Sementara itu ketersediaan alat ukur pemetaan yang kurang dalam hal akurasi dan perangkat komputer pemetaan yang kurang memadai mengakibatkan proses pemetaan harus dilakukan dengan lebih teliti dan berulang kali untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

7. Penyediaan Bibit Kehutanan yang Berkualitas

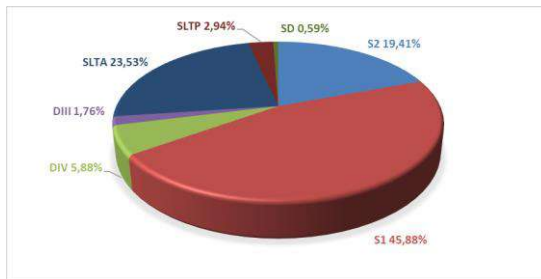
Minyak kayu putih merupakan komoditas penyumbang PAD terbesar yang dapat dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Saat ini pemenuhan kebutuhan bibit kayu putih masih dilakukan secara mandiri sehingga kualitas bibit merupakan salah satu faktor dalam mengoptimalkan produktivitas minyak kayu putih. Selain itu, banyak benih/bibit yang beredar dimasyarakat belum terjamin mutu dan kualitasnya. Dengan ketersediaan bibit kehutanan tersertifikasi dan berkualitas, maka akan dapat menjamin

produktivitas minyak kayu putih yang dihasilkan serta secara umum dapat mengoptimalkan peningkatan tutupan vegetasi.

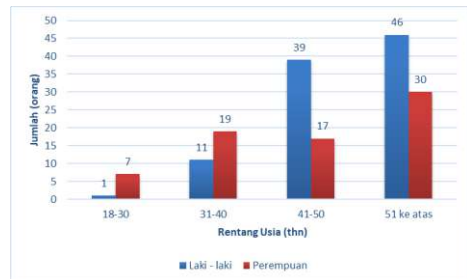
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan SDM DLHK DIY secara total per 31 Desember 2020 adalah 284 orang PNS dan 91 orang tenaga bantu. Secara terperinci profil kepegawaian (PNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai berikut.

Gambar I.4 Proporsi pegawai dinas induk berdasarkan tingkat pendidikan

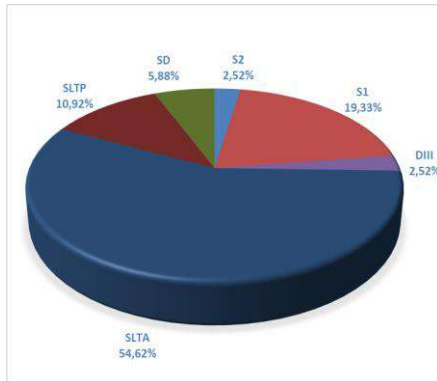


Gambar I.5 Sebaran Usia Pegawai Dinas Induk

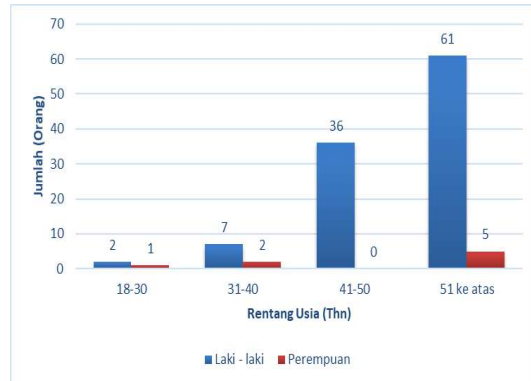


SDM berstatus PNS di dinas induk berjumlah 170 orang. Proporsi gender di dinas induk relatif seimbang dengan jumlah pegawai laki – laki 97 orang (57 %) sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan 73 orang (42,94 %). Hampir separuh pegawai dinas induk berpendidikan S1 (78 orang, 45,88 %), diikuti dengan SLTA/ sederajat (40 orang, 23,53 %), S2 (33 orang, 19,41 %), DIV (10 orang, 5,88 %), SLTP/ sederajat (5 orang, 2,94 %), DIII (3 orang, 1,76 %), dan paling sedikit SD (1 orang, 0,59 %). Sementara itu, berdasarkan sebaran usia, pegawai dinas induk sebagian besar berusia di atas 50 tahun (44,71 %). Diikuti oleh pegawai berusia 41 - 50 tahun (32,94 %), pegawai berusia 31 – 42 tahun (17,65 %) dan yang paling sedikit pegawai berusia 30 tahun ke bawah (4,71 %). Rincian sebaran usia per gender dapat dilihat pada Gambar I.5).

Gambar 1.6 Proporsi pegawai Balai KPH berdasarkan tingkat pendidikan



Gambar 1.7 Sebaran Usia Pegawai Balai KPH



Sebagai satu – satunya struktur di bawah DLHK DIY yang memegang KPA, Balai KPH Yogyakarta memiliki proporsi SDM yang cukup besar karena harus mengawasi dan mengelola hutan negara seluas 15.581 ha.¹ Dari 114 orang pegawai (PNS), pegawai laki – laki Balai KPH Yogyakarta sangat mendominasi dengan jumlah sebanyak 106 orang (92,98 %) jika dibandingkan dengan pegawai perempuan sebanyak 8 orang (7,02 %). Sebagian besar SDM di Balai KPH memiliki tingkat pendidikan SLTA/Sederajat (65 orang, 54,62 %), diikuti oleh S1 (23 orang, 19,33 %), SLTP/Sederajat (13 orang, 10,92 %), SD (7 orang, 5,88 %), dan paling sedikit DIII dan S2 masing – masing 3 orang (2,52 %). Sementara itu, berdasarkan sebaran usia, pegawai Balai KPH Yogyakarta sebagian besar berusia di atas 50 tahun (57,89 %). Diikuti oleh pegawai berusia 41 -50 tahun (31,58 %), pegawai berusia 31 – 42 tahun (7,89 %) dan yang paling sedikit pegawai berusia 30 tahun ke bawah (2,63 %). Rincian sebaran usia per gender dapat dilihat pada Gambar 1.7).

¹ Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 122 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Yogyakarta

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jabatan Struktural							
1.	Kepala Dinas	1	S1,S2	0	PLT	-	-
2.	Sekretaris	1	S1	1	S2	-	1
3.	Kasubbag Keuangan	1	S1	1	S1	-	1
4.	Kasubbag Umum	1	S1	1	S2	-	1
5.	Kasubbag Program	1	S1	1	S2	-	1
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam	1	S1	1	S2	-	1
7.	Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam	1	S1	1	S1	1	-
8.	Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1	S1	1	S2	1	-
9.	Kepala Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	1	S1	1	S1	1	-
10.	Kepala Bidang Penaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	S1	1	S2	1	-
11.	Ka Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	S1	1	S1	-	1
12.	Ka Seksi Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	1	S1	1	S1	1	-
13.	Ka Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup	1	S1	1	S1	1	-
14.	Ka Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	S1	0	PLT	-	-
15.	Ka Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	1	S1	1	S2	-	1
16.	Ka Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1	S1	1	S1	-	1
17.	Ka Bidang Planologi dan Produksi Hutan	1	S1	0	PLT	-	-
18.	Ka Seksi Planologi Hutan	1	S1	1	S2	1	-
19.	Ka Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan	1	S1	1	S1	1	-
20.	Ka Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan	1	S1	1	S1	-	1
21.	Ka Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta	1	S1	1	S2	1	-
22.	Kasubbag Tata Usaha Balai KPH	1	S1	1	S2	1	-
23.	Ka Seksi Perencanaan dan Reboisasi Balai KPH	1	S1	1	S1	1	-
24.	Ka Seksi Pemanfaatan Hutan Balai KPH	1	S1	1	S1	1	-
25.	Ka Balai Tahura Bunder	1	S1	1	S2	-	1
26.	Kasubbag TU Balai Tahura Bunder	1	S1	0	PLT	-	-

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Ka Seksi Perencanaan dan Restorasi Balai Tahura Bunder	1	S1	1	D4	1	-
28.	Ka Seksi Pemanfaatan Balai Tahura Bunder	1	S1	1	D4	1	-
29.	Ka Balai Perbenihan Kehutanan (BBH)	1	S1	1	S2	1	-
30.	Kasubbag Tata Usaha BBH	1	S1	1	S1	1	-
31.	Ka Seksi Pengembangan Perbenihan BBH	1	S1	1	S1	-	1
32.	Ka Seksi Sertifikasi BBH	1	S1	1	S1	1	-
33.	Ka Balai Pengelolaan Sampah	1	S1	1	S2	1	-
34.	Kasubbag Tata Usaha Balai Pengelolaan Sampah	1	S1	1	S1	-	1
35.	Ka Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan	1	S1	1	S1	1	-
36.	Ka Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	1	S1	1	S1	1	-
37.	Ka Balai Laboratorium Lingkungan	1	S1	1	S2	-	1
38.	Kasubbag Tata Usaha Balai Laboratorium Lingkungan	1	S1	1	S2	1	-
39.	Ka Seksi Pengujian	1	S1	1	S1	-	1
40.	Ka Seksi Pengendali Mutu	1	S1	1	S2	-	1
B. Jabatan Fungsional Tertentu							
1.	Penyuluh Kehutanan Penyelia	44	SMA	13	S2, S1,D4, D3	6	7
3.	Penyuluh Kehutanan Muda		S1	5	S2, S1, D4	3	2
4.	Penyuluh Kehutanan Madya	12	S1,S2	4	S2, S1	3	1
5.	Penyuluh Kehutanan Pertama		S1	5	S1	2	3
7.	Polisi Kehutanan Penyelia	1	D3,S1	8	S1, SMA	8	-
8.	Polisi Kehutanan Terampil			3	D3	1	2
9.	Polisi Kehutanan Pertama			2	S1	2	-
10.	Pengendali Ekosistem Hutan Muda			2	S2,S1	1	1
11.	Pengendali Ekosistem Hutan Pertama	4	S1	3	S1	1	2
12.	Pengawas Lingkungan Hidup Muda	4	S1	1	S1	-	1
15.	Pengendali Dampak Lingkungan Madya	3	S1	1	S2	1	-
17	Perekayasa Pertama	1		1	S1	1	-
C. Jabatan Fungsional Umum							
Dibawah Kasubag Keuangan							
1.	Bendahara	2	S1	2	S1, SMA	-	2
2.	Pengelola Gaji	1	D3	1	S1	-	1
3.	Pengadministrasi Keuangan	4	D3	3	SMA	1	2
4.	Pengelola Akuntansi	1	D3	1	S2	1	-
5.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	1	SMA	-	1
Dibawah Kasubag Umum							
1.	Pengelola Barang Milik Negara	4	D3	2	S1, SMA	2	-

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pengadministrasi Kepegawaian	2	D3	1	SMA	1	-
3.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	0	-	-	-
4.	Pranata Kearsipan	1	D3	1	S1	-	1
5.	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	D3	1	D4	1	-
6.	Pengadministrasi Umum	1	D3	1	SMA	-	1
7.	Pengemudi	1	SMA,SMK	1	SMA	1	-
Dibawah Kasubag Program							
1.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	4	S1	4	S1, S2, D4	1	3
2.	Pengelola Sistem dan Jaringan	1	S1,D4	1	S2	1	-
Dibawah Kasi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan							
1.	Analisis Lingkungan Hidup	4	S1, D4	3	S2, S1, D4	1	2
2.	Pengadministrasi Umum	1	D3	1	SMA	1	-
3.	Calon Pengawas Lingkungan Hidup	2	S1	2	S1	-	2
Dibawah Kasi Pengkajian Lingkungan Hidup							
1.	Analisis Lingkungan Hidup	4	S1, D4	1	S2	-	1
Dibawah Kasi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup							
1.	Penyuluh Lingkungan Hidup	4	S1, D4	3	S1, SMK	2	1
Dibawah Kasi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup							
1.	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	4	S1, D4	3	S1	-	3
2.	Pengadministrasi Umum	1	D3	1	SMK	1	-
Dibawah Kasi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun							
1.	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	4	S1, D4	4	S2,S1,SMA	1	3
Dibawah Kasi Planologi Hutan							
1.	Analisis Pengembangan Hutan	4	S1	4	S1,D4,SMA	3	1
2.	Pengadministrasi Umum	1	D3	1	SMA	-	1
Dibawah Kasi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan							
1.	Analisis Pasar Hasil Hutan	4	S1	4	S2,S1,SMK	3	1
Dibawah Kasi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan							
1.	Pengelola Permodalan dan Aneka Usaha Perhutanan Sosial	4	S1	4	S1,D4,SMK	3	1
Dibawah Kasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan							
1.	Analisis Hutan dan Lahan - Rehabilitasi Hutan dan Lahan	4	S1	3	S2,S1,SMA	2	1
2.	Pengadministrasi Umum	1	D3	0	-	-	-
Dibawah Kasi Konservasi Sumber Daya Alam							
1.	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	4	S1	2	S2,S1	1	1
Dibawah Kasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan							
1.	Analisis Pengamanan Lingkungan	4	S1	3	S1	2	1
Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai KPH							
1.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SMA	1	-
2.	Pengadministrasi Keuangan	8	D3	3	S1,SMA	1	2
3.	Pengadministrasi Kepegawaian	2	D3	2	S2,SMK	1	1
4.	Teknisi Sarana dan Prasarana	2	D3	2	SMP	2	-

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Bendahara	2	S1	2	S1,SMA	1	1
6.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	S1	1	S1	1	-
7.	Pengelola Akuntansi	1	D3	1	S1	1	-
8.	Pengelola Gaji	1	D3	1	S1	1	-
9.	Pengelola Barang Milik Negara	2	D3	1	S1	1	-
10.	Pranata Kearsipan	1	D3	1	SMA	1	-
11.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	1	SMA	-	1
Dibawah Kasi Perencanaan dan Reboisasi							
1.	Koordinator			66	S1,SMA,SMK,SMP,SMP KEJURUAN,SD	66	-
2.	Analisis Pengembangan Hutan	3	S1	1	S1	1	-
3	Pengelola Perkebunan dan Kehutanan	78	D3	0	-	-	-
Dibawah Kasi Pemanfaatan Hutan							
1.	Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha Perhutanan Sosial	18	D3	11	S1,SMA,SMK,SMP,SD	11	-
2.	Analisis Pasar Hasil Hutan	7	S1	2	S1,SMA	2	-
Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai TAHURA Bunder							
1.	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	D3	1	SMP	1	-
2.	Pengadministrasi Kepegawaian	1	D3	1	SMK	1	-
3.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SMP	1	-
4.	Pengelola Barang Milik Negara	2	D3	1	S1	1	-
5.	Pengadministrasi Keuangan	1	D3	1	SMA	1	-
6.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	S1	0	-	-	-
7.	Pranata Kearsipan	1	D3	0	-	-	-
8.	Bendahara	1	S1	0	-	-	-
9.	Pengelola Gaji	1	D3	0	-	-	-
10.	Pengelola Akuntansi	1	D3	0	-	-	-
11.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	0	-	-	-
Dibawah Kasi Perencanaan dan Restorasi							
1.	Analisis Rehabilitasi dan Konservasi	7	S1	4	S1,SMA	4	-
Dibawah Kasi Pemanfaatan							
1.	Petugas Keamanan	4	D3	4	SMA,SD	4	-
2.	Analisis Pengembangan Hutan	5	S1	2	S1,SMA	1	1
Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Laboratorium Lingkungan							
1.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	S1,D4	1	S1	1	-
2.	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	D3	1	SMA	1	-
3.	Pengadministrasi Kepegawaian	1	D3	1	SMA	-	1
4.	Pengadministrasi Keuangan	1	D3	1	SMA	-	1
5.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	0	-	-	-
6.	Pranata Kearsipan	1	D3	0	-	-	-
7.	Pengelola Barang Milik Negara	2	D3	0	-	-	-

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Bendahara	2	S1	0	-	-	-
9.	Pengelola Gaji	1	D3	0	-	-	-
10.	Pengelola Akuntansi	1	D3	0	-	-	-
11.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	0	-	-	-
Dibawah Kasi Pengendali Mutu							
1.	Analisis Penjamin Mutu	5	S1,D4	2	S1	1	1
Dibawah Kasi Pengujian							
1.	Analisis Pengujian	7	S1,D4	2	S2	-	2
Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Perbenihan Kehutanan							
1.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SMA	1	-
2.	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	D3	1	SMA	1	-
3.	Pengadministrasi Kepegawaian	1	D3	1	SMP	1	-
4.	Pengadministrasi Keuangan	1	D3	1	D3	-	1
5.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	S1	0	-	-	-
6.	Pranata Kearsipan	1	D3	0	-	-	-
7.	Pengelola Barang Milik Negara	2	D3	1	S1	-	1
8.	Bendahara	1	S1	0	-	-	-
9.	Pengelola Gaji	1	D3	0	-	-	-
10.	Pengelola Akuntansi	1	D3	0	-	-	-
11.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	0	-	-	-
Dibawah Kasi Pengembangan Perbenihan							
1.	Pengelola Teknologi Perbenihan	5	S1	5	S2,S1,SMK,SMP	3	2
Dibawah Kasi Sertifikasi Benih dan Kehutanan							
1.	Analisis Benih	5	S1	3	S1,SMP	2	1
Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Pengelolaan Sampah							
1.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SMA	-	1
2.	Pengadministrasi Keuangan	1	D3	0	-	-	-
3.	Pengelola Akuntansi	1	D3	1	SMA	1	-
4.	Pengelola Barang Milik Negara	2	D3	1	SMA	1	-
5.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	S1,D4	1	S1	1	-
6.	Pranata Kearsipan	1	D3	0	-	-	-
7.	Pengadministrasi Kepegawaian	1	D3	0	-	-	-
8.	Bendahara	2	S1	0	-	-	-
9.	Pengelola Gaji	1	D3	0	-	-	-
10.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	0	-	-	-
11.	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	D3	0	-	-	-
Dibawah Kasi Pengumpulan dan Pengangkutan							
1.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	3	S1,D4	0	-	-	-
2.	Pengelola Sampah	6	D3	2	SMA	2	-
Dibawah Kasi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir							
1.	Pengelola Sampah	6	D3	2	SMA,SMP	2	-
2.	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat	3	S1,D4	1	SMA	1	-

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembuangan Akhir						
Jumlah				284		203	81

Sumber: BKD DIY, 2020, diolah

Berdasarkan grafik sebaran usia (Induk dan Balai KPH) sebanyak 50 % pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berusia 51 tahun ke atas. Perbandingan jumlah pejabat struktural berjenis kelamin laki – laki dibanding perempuan relatif seimbang dengan rasio sebesar 21:15. Sampai dengan tgl 31 Desember tahun 2020 terdapat 4 jabatan struktural yang kosong, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2 jabatan eselon III yang belum terisi, yaitu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kepala Bidang Planologi dan Produksi Hutan serta 1 jabatan eselon IV yang belum terisi yaitu, Kasubag TU Balai Tahura Bunder. Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 98 orang. Dari aspek kualifikasi pendidikan terdapat 4 pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga*) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	01		Tanah	40	38.501.670.972
		1.3.1.01	Tanah	40	38.501.670.972
2	02		Peralatan Mesin	3.045	52.733.047.431,92
		1.3.2.01	Alat besar	77	25.490.932.422
		1.3.2.02	Alat angkutan	190	5.679.821.265
		1.3.2.03	Alat bengkel dan alat ukur	113	748.942.029
		1.3.2.04	Alat pertanian	21	141.362.500
		1.3.2.05	Alat kantor dan rumah tangga	1.646	5.477.284.361
		1.3.2.06	Alat studio, komunikasi, dan pemancar	275	1.515.825.833
		1.3.2.07	Alat kedokteran dan kesehatan	2	10.400.000
		1.3.2.08	Alat laboratorium	311	11.190.135.210
		1.3.2.09	Alat persenjataan	3	7.500.000
		1.3.2.10	Komputer	407	2.470.843.812

No.	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga*) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1.3.2.11	Alat eksplorasi	0	0
		1.3.2.12	Alat pengeboran	0	0
		1.3.2.13	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	0	0
		1.3.2.14	Alat bantu eksplorasi	0	0
		1.3.2.15	Alat keselamatan kerja	0	0
		1.3.2.16	Alat peraga	0	0
		1.3.2.17	Peralatan proses/produksi	0	0
		1.3.2.18	Rambu-rambu	0	0
		1.3.2.19	Peralatan olah raga	0	0
3	03		Gedung dan Bangunan	156	38.474.866.729
		1.3.3.01	Bangunan gedung	153	38.160.906.849
		1.3.3.02	Monumen	2	269.348.000
		1.3.3.03	Bangunan menara	0	0
		1.3.3.04	Tugu titik kontrol/pasti	1	44.611.880
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan	122	26.262.821.863
		1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	50	13.465.207.781
		1.3.4.02	Bangunan air	28	11.673.946.730
		1.3.4.03	Instalasi	24	603.790.027
		1.3.4.04	Jaringan	20	519.877.325
5	05		Aset Tetap Lainnya	3.811	1.101.417.987
		1.3.5.01	Bahan perpustakaan	3.804	191.177.501
		1.3.5.02	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga	0	0
		1.3.5.03	Hewan	0	0
		1.3.5.04	Biota perairan	0	0
		1.3.5.05	Tanaman	7	910.240.486
		1.3.5.06	Barang koleksi non budaya	0	0
		1.3.5.07	Aset tetap dalam renovasi	0	0
6	06		Konstruksi Dalam Pengerjaan	17	3.005.432.600
		1.3.6.01	Konstruksi dalam pengerjaan	17	3.005.432.600

No.	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga* (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			TOTAL	7.191	160.079.257.582,92

*Nilai aset sudah memperhitungkan penyusutan di tahun 2020

Sumber : Rekapitulasi Buku Inventaris *Intra Countable*, (DLHK DIY, 2020)

Kendaraan dinas terdiri dari yakni:

1. Dinas induk memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda enam, 18 (delapan belas) unit kendaraan roda empat, 3 (tiga) unit kendaraan roda tiga, dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit kendaraan roda dua.
2. Balai KPH Yogyakarta memiliki 3 (tiga) unit unit kendaraan roda empat, 74 (tujuh puluh empat) unit kendaraan roda dua

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung dinas maupun Gedung UPTD. Kebutuhan ruangan kantor secara umum tersedia karena masing – masing balai/bidang/seksi/subbagian sudah menempati kantor/ruang masing – masing. Kantor dinas induk dilengkapi dengan fasilitas 4 (empat) aula, ruang arsip, perpustakaan, mushola, gudang, ruang tamu, ruang laktasi, ruang ramah anak. Juga terdapat toilet ramah gender di masing – masing bidang/balai. Selain itu Dinas juga memiliki dua pabrik minyak kayu putih, 5 kantor BDH, kantor RPH dan laboratorium. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *Personal Computer/laptop* dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
APBD 2019	Rp.21.426.406.970,00	Rp.49.732.083.860,00	Rp.71.158.490.830,00
APBD 2020	Rp.23.261.645.769,00	Rp.24.552.427.409,00	Rp.48.030.733.178,00
Dana Keistimewaan	-	Rp.216.660.000,00	

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana

Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2020 dibanding tahun 2019 terjadi penurunan anggaran belanja langsung yang relatif besar akibat adanya *refocusing* kegiatan dan rasionalisasi anggaran. Meskipun demikian, ketersediaan anggaran tersebut masih cukup untuk membiayai program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2019

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/00874/Sekret tanggal 13 Maret 2020, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas evaluasi internal melalui supervisi pada pembahasan – pembahasan yang reguler dan bertahap Mempublikasikan Laporan Kinerja pada website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Terus melakukan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi 	<p>Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berkomitmen untuk meningkatkan kualitas evaluasi internal melalui koordinasi pada pembahasan yang reguler dan bertahap serta meningkatkan capaian kinerja organisasi dari dokumen perencanaan yang baik, monitoring pelaksanaan program kegiatan dan evaluasi secara periodik mingguan, bulanan dan triwulanan Laporan Kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah diunggah pada website sehingga dapat diakses secara luas oleh publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran secara lebih baik, mempergunakan data, informasi dan hasil kajian sebagai bagian dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan bersama, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dengan parameter yang terukur.

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2020
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2020 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemi COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan yang didukung oleh program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana serta Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri, Pengolahan, Jasa). Terkait hal tersebut tujuan

jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY selama lima tahun adalah :

“Meningkatkan sinergi dan efektivitas upaya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas”

dan

”Mewujudkan tata kelola hutan lestari”

Adapun sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	85,64	88,56	91,47	94,39	97,02	100	100
2.	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	Juta rupiah	720.236	734.713	742.060	749.480	756.975	764.545	764.545

Sumber : Cascading RPJMD DIY 2017 – 2022

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas	1. Melaksanakan pengkajian dan penataan lingkungan hidup	a. Melaksanakan penataan dan penegakan hukum lingkungan terpadu b. Melaksanakan pengkajian lingkungan hidup

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan	a. Mengendalikan pencemaran air, udara dan tanah b. Mengelola sampah dan limbah B3
	3. Mengembangkan kapasitas lingkungan hidup	a. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan penghargaan lingkungan hidup b. Meningkatkan mutu laboratorium lingkungan c. Melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan
	4. Mengelola tutupan vegetasi dan konservasi Sumber Daya Alam	a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan b. Melaksanakan konservasi sumberdaya alam c. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan
	5. Melaksanakan pengelolaan persampahan regional	a. Melaksanakan pengelolaan pengumpulan dan pengangkutan sampah b. Mengelolasarana dan prasarana penanganan sampah regional
Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan	1. Melaksanakan perencanaan dan bina usaha kehutanan	a. Mengelola perhutanan sosial b. Melaksanakan penatausahaan produksi hasil hutan c. Melakukan penataan hutan
	2. Mengelola hutan produksi dan hutan lindung	a. Melakukan perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan
	3. Melaksanakan pengelolaan hutan konservasi	a. Melaksanakan Pengelolaan Tahura Bunder b. Mengembangkan pelayanan pemanfaatan Tahura
	4. Mengembangkan pembibitan kehutanan	a. Mengembangkan perbenihan tanaman kehutanan b. Melaksanakan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih bibit tanaman

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2020

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2020 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1. Terwujudnya tata Kelola lingkungan hidup yang berkualitas	1.1. Program Pengkajian dan Pnaatan Lingkungan Hidup	984.437.000,00	322.201.500,00	(662.235.500,00)
	1.1.1. Kegiatan Pengkajian Lingkungan Hidup	717.700.000,00	234.494.500,00	(483.205.500,00)
	1.1.2. Pnaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	266.737.000,00	87.707.000,00	(179.030.000,00)
	1.2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	2.156.771.000,00	288.536.900,00	(1.868.234.100,00)
	1.2.1. Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan	1.511.054.000,00	187.142.900,00	(1.323.911.100,00)
	1.2.2. Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	645.717.000,00	101.394.000,00	(544.323.000,00)
	1.3. Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	2.230.037.000,00	1.219.946.520,00	(1.010.090.480,00)
	1.3.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan Hidup	902.310.000,00	489.868.500,00	(412.441.500,00)
	1.3.2. Kegiatan Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan	228.928.000,00	121.484.620,00	(107.443.380,00)
	1.3.3. Kegiatan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	1.098.799.000,00	608.593.400,00	(490.205.600,00)
	1.4. Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	2.369.123.250,00	973.039.900,00	1.396.083.350,00
	1.4.1. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.280.307.000,00	588.150.900,00	(692.156.100,00)
	1.4.2. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam	700.000.000,00	327.813.000,00	(372.187.000,00)
	1.4.3. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	198.660.000,00	57.076.000,00	(141.584.000,00)
	1.4.4. Kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif dan Sipil Teknis di Luar Kawasan Hutan (DAK)	190.156.250,00	0	(190.156.250,00)
	1.5. Program Pengelolaan Persampahan Regional	9.150.000.000,00	8.824.492.517,00	325.507.483,00
1.5.1. Kegiatan Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0	
1.5.2. Kegiatan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah	8.100.000.000,00	7.774.492.517,00	(325.507.483,00)	
Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 1		16.890.368.250,00	11.628.217.337,00	5.262.150.913,00

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
2. Meningkatkan nilai produksi kehutanan	2.1. Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan	915.448.000,00	279.156.000,00	636.292.000,00
	2.1.1. Kegiatan Penataan Hutan	414.000.000,00	169.825.500,00	(244.174.500,00)
	2.1.2. Kegiatan Penatausahaan Produksi dan Hasil Hutan	102.528.000,00	30.285.000,00	(72.243.000,00)
	2.1.3. Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial	398.920.000,00	79.045.500,00	(319.874.500,00)
	2.2. Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	8.932.665.400,00	6.973.650.580,00	1.959.014.820,00
	2.2.1. Kegiatan Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan	4.356.543.000,00	3.010.598.500,00	(1.345.944.500,00)
	2.2.2. Kegiatan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	4.576.122.400,00	3.963.052.080,00	(613.070.320,00)
	2.3. Program Pengelolaan Hutan Konservasi	1.218.626.750,00	263.364.500,00	955.262.250,00
	2.3.1. Kegiatan Pengelolaan Tahura Bunder	186.000.000,00	98.342.500,00	(87.657.500,00)
	2.3.2. Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	231.037.000,00	148.657.000,00	(82.380.000,00)
2.3.3. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasionalisasi KPH, Tahura, akses kelola hutan sosial (DAK)	801.589.750,00	16.365.000,00	(785.224.750,00)	
	2.4. Program Pengembangan Pembibitan Kehutanan	513.432.000,00	401.931.500,00	111.500.500,00
	2.4.1. Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	365.832.000,00	356.912.000,00	(8.920.000,00)
	2.4.2. Kegiatan Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	147.600.000,00	45.019.500,00	(102.580.500,00)
Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2		11.580.172.150,00	7.918.102.580,00	3.662.069.570,00
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		28.470.540.400,00	19.546.319.917,00	8.924.220.483,00

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	Dinas Induk			
1.	Program Administrasi Perkantoran	3.133.176.900,00	2.422.868.400,00	(710.308.500,00)
1.1.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.078.322.150,00	1.267.329.650,00	189.007.500,00
1.2.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	996.814.750,00	996.814.750,00	0

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	1.3. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.058.040.000,00	158.724.000,00	(899.316.000,00)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.540.443.600,00	1.622.036.242,00	(918.407.358,00)
	2.1. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	601.577.600,00	169.794.992,00	(431.782.608,00)
	2.2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	301.282.000,00	244.977.000,00	(56.305.000,00)
	2.3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	644.914.000,00	492.144.000,00	(152.770.000,00)
	2.4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	227.500.000,00	207.339.750,00	(20.160.250,00)
	2.5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	765.170.000,00	507.780.500,00	(257.389.500,00)
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	243.267.000,00	192.907.000,00	(50.360.000,00)
	3.1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	18.172.000,00	18.172.000,00	0
	3.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0
	3.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	167.852.000,00	117.512.000,00	(50.340.000,00)
	3.4. Monitoring dan Evakuasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	27.243.000	27.223.000	(20.000,00)
	Balai KPH Yogyakarta			
1.	Program Administrasi Perkantoran	506.090.850,00	425.906.850,00	(80.184.000,00)
	1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	356.850.850,00	356.050.850,00	(800.000,00)
	1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	43.620.000,00	43.620.000,00	0,00
	1.3. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	105.620.000,00	26.236.000,0	(79.384.000,00)
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	497.363.000,00	342.389.000,00	(154.974.000,00)
	2.1. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	30.500.000,00	6.000.000,00	(24.500.000,00)
	2.2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	156.188.000,00	55.814.000,00	(100.374.000,00)
	2.3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	0	0	0
	2.4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	13.125.000,00	13.125.000,00	0
	2.5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	297.550.000,00	267.450.000,00	(30.100.000,00)
	Total Anggaran Pendukung	6.920.341.350,00	5.006.107.492,00	(1.914.233.858,00)

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup DIY Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	94.39	Triwulan I	94.39
					Triwulan II	94.39
					Triwulan III	94.39
					Triwulan IV	94.39*)
2.	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	Juta rupiah	749.480	Triwulan I	749.480
					Triwulan II	749.480
					Triwulan III	749.480
					Triwulan IV	749.480*)

*) Perhitungan dilakukan pada triwulan IV

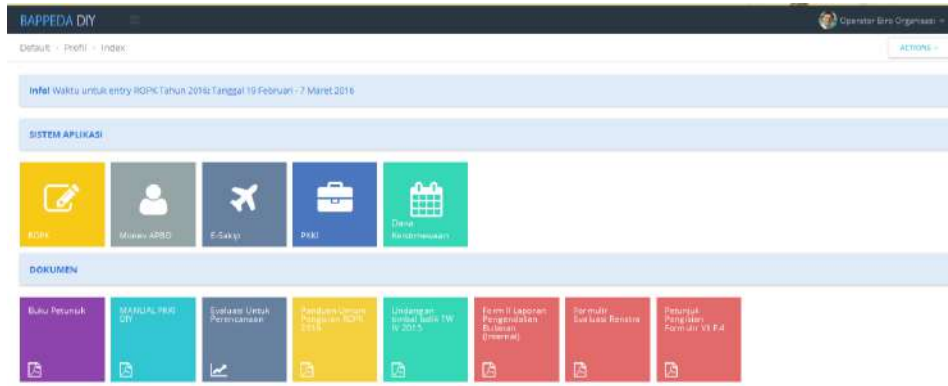
Pada tahun 2020, OPD yang di bawah Pemda DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020. Untuk Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 55,57%.

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprovo.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD. Selain itu Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY juga memiliki aplikasi database LHK untuk mendukung rekapitulasi IKLH Tahun 2019.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

Gambar II.2. SINTA KLH



Sumber: <http://dlhk.jogjaprov.go.id/databaselh>

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2020*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2020. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2019	TAHUN 2020				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4			5	6	7	8	
1	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	<u>Indikator:</u> Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup <u>Meta Indikator:</u> Capaian IKLH tahun N yang tercapai/target IKLH pada tahun akhir RPJMD x 100%	%	85,64	92,29	94,39	93,12	98,65	Sangat Baik	100
2	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	<u>Indikator:</u> Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY <u>Meta Indikator:</u> Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK)	Juta rupiah	720.236	1.086.968.1	749.480	1.103.535,8*)	147,24	Sangat Baik	764.545

*) Berdasarkan hasil proyeksi

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas

Kinerja sasaran Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas diukur dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya tata Kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	Capaian IKLH tahun N yang tercapai/target IKLH pada tahun akhir RPJMD x 100%

Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup diperoleh dari perbandingan antara nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun berjalan (N) dengan target nilai IKLH pada tahun terakhir RPJMD/Renstra dikalikan 100%.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH adalah :

1. Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas air 10 sungai di Kabupaten/Kota DIY;
2. Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO₂ dan NO₂. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas udara ambient dengan metode passive sampler di Kabupaten/Kota DIY;
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. IKTL ini diperoleh dari luasan tutupan vegetasi di DIY yang telah dikonversi berdasarkan ketentuan dari kementerian Lingkungan Hidup (KLHK).

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah

$$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$$

Berdasarkan hasil penghitungan masing – masing indeks, diperoleh nilai IKLH untuk tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1

Indikator Sasaran	Target	Realisasi
IKA	38,60	38,43
IKU	88,40	89,14
IKTL	60,86	58,32
IKLH 2020	62,44	61,60
IKLH Tahun Terakhir Renstra	66,15	Belum tersedia
Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup 2020	$\frac{62,44}{66,15} \times 100\%$	$\frac{61,60}{66,15} \times 100\%$
Nilai realisasi IKLH 2020 x 100% Nilai Target IKLH 2022	94,39%	93,12%

Dengan demikian realisasi kinerja sasaran Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator Persentase ketercapaian

sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	92,29 %	94.39 %	93.12 %	98,65	100 %	98,65

Tabel III.6 Capaian IKLH DIY Tahun 2018, 2019 dan 2020 dibandingkan dengan IKLH Nasional Tahun 2019

	IKA	IKU	IKTL	IKLH
DIY 2018	40,25	84,24	60,86	61,69
DIY 2019	38,65	85,25	59,90	61,13
DIY 2020	38,43	89,14	58,32	61,60
IKLH Nasional 2019 (Sumber: KLHK, 2020)	52,62	86,56	62,00	66,55

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa nilai IKLH DIY masih di bawah nilai IKLH Nasional. Nilai IKA dan IKTL DIY pada tahun 2020 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Meskipun demikian, khusus untuk nilai IKU pada tahun 2020 kecenderungannya justru meningkat dari tahun ke tahun dan bahkan melebihi nilai IKU nasional.

3.1.1.1. Data Dukung Capaian Persentase Ketercapaian Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Perhitungan IKA Tahun 2020 didasarkan pada data hasil pemantauan kualitas air sungai terhadap 7 parameter (BOD, DO, COD, TSS, PO4, bakteri koli tinja dan bakteri Koli total). Pemantauan dilakukan di 10 (sepuluh) sungai selama 2 (dua) periode yang mewakili musim hujan dan musim kemarau. Setiap periode terdiri dari 50 (lima puluh) titik pantau, sehingga keseluruhan data yang ada 100 (seratus) titik pantau. Penentuan titik pantau berdasarkan pada wilayah administratif, letak

geografis, mewakili sumber pencemar, *outlet* DAS, titik *intake* pengelolaan air minum, dan hulu sungai yang dianggap tidak banyak aktivitas manusia. Langkah perhitungan dilakukan melalui penentuan status mutu air di setiap titik. Indeks Kualitas Air (IKA) akan didapat setelah dihitung melalui pemenuhan mutu air dikalikan bobot nilai indeks. Perhitungan status mutu air sungai dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran.

Tabel III.7 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air di DIY

No.	Sungai	Nilai IKA (Pengukuran DIY)	Nilai IKA (Pengukuran Kab/Kota)	Nilai IKA (Penggabungan)
1.	Winongo	32,5	42,73	43,09
2.	Code	38,75	38,37	39,30
3.	Gajahwong	42,5	37,89	37,89
4.	Kuning	37,5	39,23	40,77
5.	Konteng	20,00	25,71	25,71
6.	Bedog	28,00	45	45,00
7.	Belik	40,00		40,00
8.	Bulus	40,00		40,00
9.	Oyo	37,5		35,00
10.	Tambakbayan	35,00		37,50
Nilai IKA DIY (Rata-rata 10 sungai)		35,18		
Nilai IKA DIY 2020				38,43

Sumber: Laporan IKLH DLHK DIY, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka IKA DIY tahun 2020 sebesar 38,43 belum memenuhi target RPJMD (38,60). Dan jika dibandingkan dengan capaian IKA pada tahun 2019 (38,65), maka angka IKA tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 ini, parameter dominan melebihi bakumutu air sungai adalah parameter Bakteri *Coli* Tinja dan Bakteri Total *Coliform*. Hal ini menunjukkan bahwa kadar pencemar terbesar adalah dari limbah domestik.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks kualitas udara pada umumnya didasarkan pada 5 (lima) utama, yaitu Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Namun dalam perhitungan IKLH ini hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. IKU DIY dihitung dari data hasil pengukuran

kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* pada 20 titik pantau yang tersebar di Kabupaten/Kota dikolaborasi dengan hasil pengukuran kualitas udara ambien metode *passive* yang diukur oleh Kabupaten Sleman. Titik pantau metode *passive* mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan.

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program *European Union* melalui *European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project*, yaitu “*Common Information to European Air*” (Citeair II), yang digunakan sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam harian dan tahunan. Perhitungan indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar *European Union (EU) Directives*. Apabila nilai indeks >1, berarti kualitas melebihi standar EU. Sebaliknya apabila indeks ≤1 artinya kualitas udara memenuhi standar EU.

Selanjutnya kualitas udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui persamaan sebagai berikut :

$$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$$

Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data konsentrasi pencemar, sehingga harus dilakukan konversi ke dalam konsentrasi kualitas udara, dengan melakukan pengurangan dari 100 persen. Hasil perhitungan IKU dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III.8 Data Indeks Kualitas Udara DIY tahun 2020

No.	Lokasi	Rerata NO2	Rerata SO2	Ieu	IKU
		µg/Nm ³	µg/Nm ³	Indeks	Indeks
1.	Kulonprogo	7,78	5,22	0,22766	92,91
2.	Bantul	13,97	7,68	0,36675	85,18
3.	Gunungkidul	9,51	3,64	0,20998	93,89
4.	Sleman	12,01	7,61	0,3403	86,65
5.	Kota Yogyakarta	14,01	6,38	0,3345	86,97
IKU Rata-rata					89,12

Sumber data: Laporan IKLH DIY, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan data kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler*, diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 89,12 yang telah

melebihi target RPJMD (88,40). Jika dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2019 sebesar 85,25, maka pada tahun 2020, nilai IKU mengalami peningkatan sebanyak 3,89.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Perhitungan IKTL diawali dengan melakukan perhitungan luas TH (Tutupan Hutan). Untuk itu, luas tutupan vegetasi selain hutan terlebih dahulu dilakukan konversi performa. Setelah luas hutan dan luas tutupan vegetasi terkonversi dijumlah, kemudian dibagi luas wilayah sehingga diketahui luas TH. Selanjutnya IKTL dihitung dengan rumus:

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$$

Keterangan :

- 84,3 : tutupan hutan tertinggi di Papua
 TH : Tutupan Hutan (Tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas wilayah)
 50 dan 54,3 : Konstanta

Tabel III.9 Hasil Perhitungan IKTL DIY

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Faktor Konversi	Hasil Konversi (Ha)
1.	Hutan Produksi	13.439,286	1	13.439,286
2.	Hutan Lindung	2.294,926	1	2.294,926
3.	Hutan Rakyat	79.262,580	1	79.262,580
4.	Cagar alam Geologi	145,179	1	145,179
5.	Cagar alam	11.877	1	11.877
6.	Taman Wisata Alam	1.035	1	1.035
7.	Taman Hutan Raya	615,186	1	615,186
8.	Taman Nasional	1.865,454	1	1.865,454
9.	Hutan Penelitian	101,645	1	101,645
10.	Suaka Margasatwa	619,586	1	619,586
11.	Rawan Bencana Alam Geologi	3.355,859	1	3.355,859
12.	Perkebunan	21.002,973	0,4	8.401,189
13.	Lahan Pangan Tidak Beririgasi	40.854,715	0,1	4.085,4715
14.	Sempadan Pantai	1.311,106	0,6	786,663
15.	Sempadan sungai	5.454,789	0,6	3.272,874
16.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)*)	9.818,780	0,6	5.891,268
	TOTAL			124.150,078

*) Data RTH merupakan data Kajian Feasibility Study RTH di DIY Tahun 2018 oleh BLH DIY

Sumber data : Olah data citra satelit KLHK dan DLHK DIY Tahun 2020 dalam Laporan IKLH DIY Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel, maka dapat dihitung Tutupan hutan, dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{TH} &= \text{Luas tutupan vegetasi hasil konversi/Luas wilayah} \\ &= 124.150,078/318600 \\ &= 0,390 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{IKTL} &= 100 - ((84,3 - (0,39 \times 100)) \times 50/54,3) \\ &= 100 - ((84,3 - 39) \times 0,92) \\ &= 100 - (45,3 \times 0,92) \\ &= 100 - 41,676 \\ &= 58,32 \end{aligned}$$

Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2020 adalah 58,32. Adapun target IKTL dalam RPJMD tahun 2020 adalah 60,86 sehingga realisasi IKTL belum mencapai target. Apabila dibandingkan dengan realisasi IKTL tahun 2019 sebesar 59,7, realisasi IKTL tahun 2020 mengalami penurunan.

3.1.1.2. Analisis Ketercapaian

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas adalah sebagai berikut:

- Ketercapaian 93,12 %, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 98,65 % (belum memenuhi target).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 92,29 %, terdapat kenaikan sebesar 0,83 %.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Gambar III.1. Preparasi sampel kualitas air di salah satu titik pantau Sungai Gajahwong



3.1.1.3. Faktor Pendukung

- a. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.
- b. Peningkatan Indeks Kualitas Udara yang signifikan kemungkinan disebabkan oleh menurunnya kadar emisi kendaraan bermotor dan pabrik akibat kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial

3.1.1.4. Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Anggaran kegiatan mengalami beberapa kali rasionalisasi sehingga penyelenggaraan kegiatan, khususnya yang secara langsung mendukung ketercapaian sasaran strategis menjadi tidak maksimal
- b. Beberapa pelaksanaan kegiatan yang bersifat pertemuan, pendampingan, monitoring ke lokasi, dan koordinasi secara langsung terpaksa ditunda atau gagal dilaksanakan karena penerapan protokol kesehatan semenjak pandemi COVID-19. Meskipun beberapa pertemuan dapat diselenggarakan secara daring, namun untuk pertemuan yang melibatkan masyarakat metode daring masih kesulitan
- c. Tingginya kadar pencemaran yang berasal dari limbah domestik menyebabkan tingginya kadar Bakteri *Coli* Tinja dan Bakteri *Coliform*
- d. Musim kemarau yang cukup panjang menyebabkan debit sungai yang kecil sehingga konsentrasi kadar pencemar di dalam air meningkat
- e. Tidak tersedianya data 1 (satu) periode menyebabkan kurangnya varian data. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19, tidak memungkinkan untuk melakukan pengambilan sampel di sungai karena pertimbangan faktor keamanan
- f. Apabila dibandingkan dengan realisasi IKTL tahun 2019 sebesar 59,7, realisasi IKTL tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan ini antara lain disebabkan karena tahun 2020 ini menggunakan sumberdata sebagian besar dari hasil interpretasi Citra Landsat yang terbaru dari KLHK. Berdasarkan data citra terdapat penurunan tutupan vegetasi pada beberapa jenis penggunaan lahan, yaitu perkebunan, dan lahan pangan tak beririgasi, walaupun untuk jenis lainnya terdapat peningkatan.
- g. Kegiatan penanaman yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020 mengalami rasionalisasi anggaran

3.1.2. Sasaran 2: Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya nilai produksi kehutanan diukur dengan 1 indikator. Indikator tersebut yaitu nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY (Juta Rupiah)	Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK)

Capaian nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun 2020 belum dirilis BPS DIY, sehingga capaian nilai PDRB sub sektor kehutanan menggunakan proyeksi. Kinerja sasaran meningkatnya nilai produksi kehutanan dengan indikator nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB (Juta Rupiah) pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.11 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB (Juta Rupiah)	1.086.968,1	749,480	1.103,5358*)	147,24 %	764.545	144,33%

*) Angka Sangat Sementara, capaian Tahun 2020 belum dirilis oleh BPS (Data menggunakan proyeksi)

Berdasarkan tabel III.6 kolom 5 realisasi nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY sebesar 1.103.535,8 juta rupiah maka capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2020 dengan persentase realisasi sebesar 147,24 %. Sementara itu, nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY di tahun terakhir

Renstra (2022) ditargetkan sebesar 764.545 juta rupiah. Maka jika dibandingkan dengan capaian saat ini, maka sudah terlampaui sebesar 44,33 %.

Untuk mendapatkan proyeksi nilai PDRB subsektor kehutanan pada tahun 2020, maka diperlukan data mentah berupa nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu DIY Tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan data series tersebut diperoleh laju PDRB yang fluktuatif dari tahun ke tahun.

Tabel III.12 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu DIY Tahun 2010 - 2019

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	649.337,8	684.673,9	707.783,8	750.207,7	816.386,5	902.903,4	955.185,0	1.004,94	1.020,26	1.086,96
2.	Laju PDRB	-	0,054418	0,033753	0,059939	0,088213	0,105975	0,057903	0,052094	0,015242	0,065380
			671	149	066	971	417	869	516	129	926

Berdasarkan hasil estimasi diperoleh bahwa laju PDRB dari tahun 2017 menuju ke tahun 2018 merupakan angka terendah dalam rentang tahun 2010 sampai dengan 2019. Oleh karena itu, angka laju ini dipilih sebagai faktor pengali untuk menghitung nilai PDRB Subsektor Kehutanan Tahun 2020 dengan rumus

$$\text{Nilai proyeksi PDRB Tahun } n = (\text{Laju PDRB Minimal} \times \text{Nilai PDRB Tahun } n-1) + \text{Nilai PDRB Tahun } n-1$$

sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai PDRB Tahun 2020} &= (0,015242129 \times 1.086.968,1) + 1.086.968,1 \\ &= 1.103.535,8 \end{aligned}$$

3.1.2.1. Data Dukung Capaian Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan

Karena nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun 2020 hanya dapat ditampilkan dalam bentuk hasil proyeksi, maka untuk memberikan gambaran

kinerja subsektor kehutanan pada tahun 2020 berikut disajikan data komponen penyumbang PDRB yang berasal dari urusan kehutanan:

Tabel III.13 Komponen Penyumbang PDRB yang berasal dari Urusan Kehutanan

No.	Uraian	Volume	
		2019	2020
1.	Produksi kayu bulat (m³)	154.210,60	71.335,54
a.	Kayu Bulat Hutan Negara	1.103,90	2.249,84
b.	Kayu Bakar Hutan Negara	37,38	0,00
c.	Kayu Bulat Hutan Rakyat	153.069,32	69.085,70
2.	Produksi kayu olahan (m³)	24.090,41	26.715,31
a.	Kayu Gergajian/ <i>Swan Timber</i> (m ³)	6.171,34	3.931,62
b.	Kayu lapis/ <i>plywood</i> (m ³)	1.065,10	4.956,46
c.	<i>Veneer</i> (m ³)	1.065,12	1.211,98
d.	<i>Barecore</i> (m ³)	15.788,85	16.493,30
e.	<i>Blockboard</i> (m ³)	0	121,95
3.	Produksi hasil hutan non kayu		
a.	Minyak kayu putih (liter)	39.323	40.353
b.	Bambu (batang)	127.330	477.493
4.	Jasa Lingkungan (Rp)	2.454.374.875	409.761.125
a.	Pengelolaan Hutan Mangunan	2.411.134.750	403.917.625
b.	Pengelolaan Hutan Produksi Klayar Kenet	21.874.375	1.580.750
c.	Pengelolaan Hutan Produksi Ngingrong Mulo	21.365.750	4.262.750

Sumber: Tabulasi Data Statistik DLHK DIY, 2020

Produksi total kayu bulat pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 53,74 %. Penurunan yang sangat signifikan ini berasal dari produksi kayu bulat hutan rakyat. Sementara itu, produksi kayu dari dalam kawasan meningkat 103,80 % jika dibandingkan tahun 2019. Penjualan kayu bulat berhasil menyumbangkan PAD sebesar Rp. 1.326.196.879,- sehingga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.1.034.530.000,-.

Selain dari hasil hutan kayu pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan juga didukung oleh hasil hutan bukan kayu, yaitu produksi daun kayu putih. Daun kayu putih ini diangkut ke pabrik kayu putih Sendangmole dan Gelaran untuk diproses menjadi minyak kayu putih. Target awal produksi minyak kayu putih pada tahun 2020 adalah sebesar 44.285 liter. Namun dengan adanya rasionalisasi anggaran, sehingga terdapat pengurangan target produksi menjadi 41.610 liter minyak kayu putih. Berdasarkan tabel di atas realisasi produksi minyak kayu putih tahun 2020

hanya 40.353 liter (96,97% dari target). Beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Awalnya produksi minyak kayu putih direncanakan pada bulan April 2020 sampai dengan November 2020 dengan target daun kayu putih 4.835 ton yang ditaksir menghasilkan 44.285 liter minyak kayu putih. Namun pada perjalanannya produksi minyak kayu putih terdampak pandemi COVID-19. Penundaan pengadaan barang dan jasa serta arahan untuk tidak mengumpulkan orang sebagai tindak lanjut upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 berimbas terhadap tertundanya pungutan menjadi bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2020;
2. Capaian produksi tahun 2020 tidak dapat optimal karena pada bulan Oktober sudah memasuki musim penghujan dengan intensitas hujan cukup tinggi sehingga pungutan daun kayu putih terhambat;
3. Adanya rasionalisasi anggaran rehabilitasi jalan produksi mengakibatkan jalan tidak dapat dilalui truk angkutan daun kayu putih pada musim penghujan

Selain berkontribusi terhadap nilai PDRB subsektor kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY juga turut berkontribusi terhadap peningkatan PDRB sektor jasa lainnya melalui pemanfaatan jasa lingkungan untuk wisata alam kehutanan. Meskipun demikian, tingkat kunjungan wisata alam kehutanan di DIY turut terdampak oleh pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan yang berasal dari jasa lingkungan di Mangunan, Klayar dan Ngingrong sebesar Rp. 409.761.125,-. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 2.454.374.875,-.

3.1.2.2. Analisis Ketercapaian

Analisis Ketercapaian Sasaran 2: Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. Ketercapaian 1.103.535,8 juta rupiah, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 147,24 % (sudah memenuhi target).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 1.086,9681 juta rupiah, terdapat kenaikan sebesar 16,5677 juta rupiah.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Gambar III.2. Pelaksanaan Tebang Pilih di RPH Semanu Tahun 2020



3.1.2.3. Faktor Pendukung

- a. Dukungan anggaran, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.
- b. Terjadi penurunan tingkat kerusakan hutan pada tahun 2020 sebesar 800% jika dibandingkan tahun 2019.

3.1.2.4. Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Anggaran kegiatan mengalami beberapa kali rasionalisasi sehingga penyelenggaraan kegiatan, khususnya yang secara langsung mendukung ketercapaian sasaran strategis menjadi tidak maksimal
- b. Masih terdapat kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain di luar kepentingan kehutanan sehingga menghambat upaya pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal. Selain itu luasan hutan rakyat cukup rentan mengalami penurunan karena merupakan hutan rakyat dimana pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan pemilik lahan

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	94,39	93,12	98,65	12.030.148.837,00	11.057.801.755,00	91,91
2	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	749.480	1.103.535,8	147,24	7.516.171.080,00	6.694.028.274,00	89,06
Jumlah						19.546.319.917,00	17.751.830.029,00	90,81
Program pendukung						5.006.107.492,00	4.489.641.656,00	89,68
Total Belanja Langsung						24.552.427.409,00	22.241.471.685,00	90,58

Berdasarkan tabel III.5 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan sebesar Rp. 24.552.427.409,00, terealisasi Rp.22.241.471.685,00 atau 90,58%. Sisa anggaran sebesar Rp.2.310.955.724,00 atau 9,412 % antara lain bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas dilaksanakan sesuai kebutuhan
- Efisiensi makan dan minum rapat karena sebagian besar rapat diselenggarakan secara daring
- Efisiensi honor narasumber karena menyesuaikan SHBJ
- Belanja yang tidak direalisasikan, antara lain:
 1. Sertifikasi laboratorium lingkungan sebesar Rp.14.032.030,00 yang tidak jadi dilaksanakan tahun 2020. Berdasarkan surat edaran terbaru dari KAN tentang jadwal survailance yg semula 12 bulan dari tanggal

sertifikat menjadi 15 -18 bulan. Sehingga untuk reakreditasi baru akan jatuh pada Agustus 2021;

2. Belanja jasa penyelesaian perkara kasus tidak terealisasi sebesar Rp.5.000.000,00 karena hanya ada 1 kasus yang sampai di tingkat kejaksaan; Sewa sarana mobilitas darat tidak terealisasi sebesar Rp.1.000.000,00 karena barang bukti sudah terangkut sesaat pada saat penangkapan tersangka pencurian;
3. Gerakan Bersih Sungai dirasionalisasi karena pandemi COVID-19 namun jasa konsultasi pengawas/pendampingan (honor perencana kegiatan) menjadi sisa Rp.13.575.000,00 karena sebagian sudah terlanjur dibayarkan untuk persiapan selama 2 bulan (Maret dan April).

3.3. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY antara lain :

- a. Pengamanan Kawasan TAHURA Bunder bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP)
MMP merupakan kelompok masyarakat sekitar hutan yang dibentuk untuk membantu Polisi Hutan dalam pelaksanaan perlindungan hutan di bawah koordinasi, pembinaan dan pengawasan instansi Pembina. Dengan dibentuknya MMP, pelaksana mampu menghemat anggaran negara dan mengurangi konflik dengan masyarakat sekitar.
- b. Penyelamatan Anakan Alam
Penanaman di kawasan hutan khususnya DIY otomatis harus ada anggaran pembelian bibit. Dengan penyelamatan anakan alam yang ada (dalam bentuk pemberian tanda) sudah tentu mengurangi biaya pengadaan bibit.
- c. Percepatan proses validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan sistem Asistensi Pra validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Perbaikan KLHS hasil validasi terkadang memakan waktu yang lama, sehingga sekretariat Pokja Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) membuat inovasi berupa pendampingan dan asistensi proses percepatan validasi. Dengan adanya asistensi, kelengkapan administrasi dan sistematika penulisan

segera dapat terpenuhi, sehingga mempercepat proses validasi substansi dokumen KLHS.

- d. Digitalisasi arsip Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (SKKL-AMDAL)

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (SKKL-AMDAL) sebelumnya riskan untuk rusak/kotor akibat termakan usia. Oleh karena itu dilakukan digitalisasi agar mudah dalam pengarsipan dan pencarian.

- e. Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya

Wanawiyata Widyakarya merupakan salah satu model usaha di bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan dan Kehutanan sebagai percontohan tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya. Dengan menetapkan Kelompok Tani Hutan sebagai Wanawiyata Widyakarya, kelompok tersebut tidak hanya sekedar menjual hasil usahanya namun juga sebagai tempat pelatihan dan pemagangan.

- f. Database Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan menghimpun seluruh data kegiatan ke dalam satu *platform Google Drive* sehingga memudahkan dalam mengakses data yang dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Pendekatan ini juga sudah mulai direplikasi oleh seksi yang lain.

- g. Pelayanan Permohonan Sertifikasi Bibit Secara Daring

Untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat khususnya pengada/pengedar benih/bibit kehutanan, permohonan sertifikasi sumber benih, bibit dan benih tanaman kehutanan dapat dilakukan secara daring melalui Whatsapp/Email yang selanjutnya dilengkapi dengan dokumen terkait pada saat pemeriksaan lapangan.

- h. Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Pengujian Pelayanan Air dan Udara Berbasis *Online*

Merupakan sistem informasi yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan pendaftaran pengujian contoh uji yang meliputi air bersih, air limbah, dan air permukaan secara daring agar lebih efektif dan efisien. Dengan demikian tercipta pelayanan publik secara *realtime, up to date* dan mempermudah akses pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai pengujian di Balai Laboratorium Lingkungan.

- i. Penyelamatan/Konservasi Pohon langka (terancam punah), bersejarah dan bernilai budaya di Wilayah DIY

Merupakan aksi konservasi sumberdaya hayati dengan membangun jaringan komunikasi dengan berbagai kelompok antara lain: Kelompok Tani Hutan, Kelompok Pemerhati Kehati khususnya tanaman hutan, NGO, lembaga penelitian dan lembaga pendidikan dalam menerapkan demplot khusus pembiakan tanaman langka di Tahura Bunder.

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis capaian sasaran kinerja, diperoleh kesimpulan bahwa: Sasaran “Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas” belum tercapai dengan persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup sebesar 93,12 %; sedangkan sasaran “Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY” tercapai dengan nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY sebesar 1.103.535,8 juta rupiah. Pencapaian sasaran ini akan terus ditingkatkan untuk periode tahun selanjutnya.
2. Secara garis besar, penyelenggaraan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY di tahun anggaran 2020 berjalan dengan baik. Akan tetapi, ada beberapa hal yang dapat dijadikan evaluasi untuk peningkatan program dan kegiatan di tahun selanjutnya yaitu:
 - a. Lebih dari separuh SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berusia 50 tahun ke atas sementara sebagian besar kegiatan yang diselenggarakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah di lapangan yang membutuhkan fisik yang prima. Masalah ini akan semakin berdampak dengan berkurangnya jumlah personil karena memasuki masa purna tugas;
 - b. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk, dan laju migrasi penduduk (mahasiswa/pelajar) dan aktivitas perekonomian dan bisnis, terutama pariwisata ke DIY khususnya KPY (Kawasan Perkotaan Yogyakarta) menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, salah satunya adalah tingginya timbulan sampah sementara kapasitas penampungan sampah di TPA Regional saat ini sudah melebihi ambang batasnya;

- c. Berdasarkan perhitungan kualitas air sungai diketahui bahwa sepuluh sungai yang ada di DIY kondisinya tercemar, mulai dari ringan sedang hingga berat;
- d. Kondisi muka air tanah khususnya cekungan air tanah Yogyakarta - Sleman selalu mengalami penurunan. Berkurangnya lahan terbuka akibat alih fungsi lahan menjadikan keseimbangan siklus hidrologi menjadi terganggu. Hal ini berpotensi menjadi ancaman bencana banjir dan kekeringan;
- e. Terjadinya lahan kritis yang disebabkan oleh adanya proses degradasi lapisan tanah akibat erosi tanah yang berkepanjangan. Lahan kritis yang disebabkan oleh proses erosi ini banyak ditemukan di wilayah pegunungan tua yang sudah tidak lagi memperoleh suplai pembentukan tanah kecuali dari proses-proses biologis yang berupa dekomposisi biomasa dan pelapukan batuan oleh makhluk hidup;
- f. Usaha untuk meningkatkan nilai IKLH masih terhambat oleh adanya pemikiran sektoral yang memandang masalah lingkungan semata-mata sebagai tanggung jawab instansi lingkungan hidup saja;
- g. Adanya *refocusing* kegiatan dan rasionalisasi anggaran mengakibatkan penyelenggaraan beberapa kegiatan menjadi tidak maksimal;
- h. Data statistik sektoral turut berkontribusi pada keakuratan dan kelengkapan data statistik daerah secara makro. Akan tetapi hingga saat ini infrastruktur digital yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY masih belum secara optimal mendukung pengorganisasian data yang dimiliki;
- i. Tidak semua Bupati/Walikota bersedia menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Wilayah hutan DIY, khususnya wilayah hutan produksi dan hutan lindung tidak terlalu luas dan tidak bisa bertambah tetapi menjadi tumpuan besar bagi masyarakat sekitar hutan baik dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungannya sehingga perlu perencanaan yang lebih matang untuk pengelolaannya
- k. Kondisi tegakan hutan mayoritas berupa tegakan pertumbuhan kurang;
- l. Masih terdapat kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain diluar kepentingan kehutanan sehingga menghambat upaya pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal. Selain itu luasan hutan rakyat cukup rentan mengalami penurunan karena merupakan hutan hak milik

masyarakat dimana pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan pemilik lahan.

3. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 tidak lepas dari beberapa faktor pendukung berikut, antara lain:
 - a. Datangnya musim penghujan yang tepat atau hampir bersamaan dengan jadwal penanaman sehingga dapat meningkatkan *survival rate* bibit
 - b. Antusiasme dan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat seperti Kelompok Tani Hutan, Jejaring Pengelola Sampah Mandiri, sekolah – sekolah peserta Adiwiyata serta pihak – pihak terkait baik di tingkat DIY maupun Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan
 - c. Adanya dukungan teknologi yang memungkinkan penyelenggaraan program kegiatan dilakukan secara daring
4. Langkah – langkah perbaikan baik yang sudah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY maupun menjadi rencana aksi ke depan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengatasi permasalahan SDM telah dilaksanakan antara lain dengan penunjukan pejabat pelaksana harian maupun pejabat pelaksana tugas, melakukan *rolling* pegawai dengan menempatkan pegawai yang lebih kompeten di bagian yang lebih strategis, dan redistribusi beban kerja dalam lingkup seksi/subbagian;
 - b. Beberapa langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah persampahan antara lain perlunya teknologi pengolahan sampah modern di TPA dan perlunya perbaikan sistem tata kelola persampahan dengan melihat perkembangan kawasan dan potensi kawasan yang menghasilkan sampah lebih banyak dari tempat lainnya. Selain penanganan sampah di TPA perlu adanya pengurangan sampah dari hulunya dengan mengoptimalkan mekanisme pengelolaan sampah mandiri;
 - c. Upaya yang dilakukan pemerintah DIY dalam mengatasi pencemaran sungai oleh bakteri koli adalah dengan mengidentifikasi sumber pencemar dan membuat inovasi teknologi yang implementatif, mudah dan murah terkait penanggulangan pencemaran bakteri koli, juga mengadakan penyedotan jamban secara berkala, pembangunan IPAL Komunal untuk limbah domestik, serta memperbesar sistem jaringan perpipaan yang menghubungkan IPAL Komunal tersebut dengan IPAL Sewon. Selain upaya tersebut di atas yang merupakan pendekatan dari segi peningkatan kualitas air, perlu juga didukung dengan upaya peningkatan kuantitas air sungai. Kegiatan penambahan debit aliran air sungai salah satunya dengan menghidupkan kembali mata air – mata air yang ada di kiri kanan sungai.

Dengan bertambahnya debit aliran air sungai maka zat pencemar akan terencerkan sehingga meminimalisasi dampaknya terhadap organisme maupun lingkungan;

- d. Untuk mengatasi persoalan akibat alih fungsi lahan antara lain dengan upaya peningkatan konservasi air tanah melalui pembuatan sumur resapan, pemantauan muka air tanah melalui pembuatan sumur pantau, pembuatan sumur resapan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan air tanah. Selain itu perlu dilakukan upaya mengurangi peningkatan konversi lahan terbuka menjadi lahan terbangun dengan memberikan fasilitas sertifikasi lahan khusus sawah dan percontohan pertanian modern di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Selain itu, perlu dilakukan audit tata ruang dengan memantau secara ketat agar tidak terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang;
- e. Tindakan teknis yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan lahan kritis adalah rehabilitasi lahan kritis untuk lahan yang sudah berstatus lahan kritis dan konservasi lahan terhadap lahan yang berstatus potensial kritis. Tindakan rehabilitasi lahan dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan kondisi lahan yang kritis menjadi lahan yang produktif lagi, yaitu lahan dengan lapisan tanah yang tebal dan subur, sedangkan konservasi tanah bertujuan untuk mengamankan tanah yang berpotensi kritis tersebut agar tidak menjadi lahan kritis;
- f. Upaya peningkatan nilai IKLH perlu diintensifkan dengan membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain melalui beberapa intervensi seperti kebijakan yang pengendalian pencemaran air dan udara, peningkatan kualitas tutupan lahan, pemantauan dan penyediaan data/informasi yang akurat, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta pemberian insentif dan disinsentif;
- g. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan cara memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran strategis dinas dan menghasilkan *multiplier effect* yang lebih besar di masyarakat. Selain itu, beberapa pelaksanaan kegiatan yang bersifat pertemuan, pendampingan, monitoring ke lokasi, dan koordinasi secara langsung dialihkan menjadi sistem daring sehingga menghemat anggaran perjalanan dinas dan rapat
- h. Percepatan pengembangan sistem informasi dan direktori data yang memberikan kemudahan dalam mengakses data baik bagi komunitas

- internal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY maupun bagi masyarakat umum;
- i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY perlu meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada kepala daerah dan pemerintah kabupaten/kota untuk dapat bersinergi dalam penegakan hukum lingkungan di wilayah masing – masing;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mulai mempersiapkan bahan untuk penyusunan RPHJP 2024 – 2033 sebagai dasar dalam pengelolaan hutan jangka panjang;
 - k. Melakukan rehabilitasi dan menambah jumlah tanaman dalam tegakan sehingga jumlah tanaman menjadi normal dan dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendorong pemanfaatan sumberdaya hutan lainnya yang berupa jasa atau pemanfaatan lainnya yang tidak terkendala pada kondisi tanaman;
 - l. Penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan Rakyat yang ada di DIY melalui penyuluhan kehutanan dan pembinaan intensif dalam pengembangan aneka usaha kehutanan dengan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2017	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	85,64	88,56	91,47	94,39	97,02	100,00	100,00
2.	Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	Juta rupiah	720.236	734.713	742.060	749.480	756.975	764.545	764.545

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2020



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Strategi Kerja... 2020-2024

Jalan Argukembang Nomor 19, Bako, Yogyakarta 55225 Telp: (0274) 56518, Fax: (0274) 512447
Website: dlh.jogjaprov.go.id Email: dlh@jogjaprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dengan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. HANANTO HADI PURNOMO, M.Sc
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGGU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 6 November 2020

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



PIHAK PERTAMA
PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN DIY



HANANTO HADI PURNOMO, M.Sc.
NIP. 19610223 199902 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	94,39	Triwulan I	94,39
					Triwulan II	94,39
					Triwulan III	94,39
					Triwulan IV	94,39
2.	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	Juta rupiah	749,480	Triwulan I	749,480
					Triwulan II	749,480
					Triwulan III	749,480
					Triwulan IV	749,480

Dukungan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
Total Jumlah Anggaran	36.050.881.750,00	24.769.087.409,00	(11.281.794.341,00)	
1. Program Pengkajian dan Penaatan Lingkungan Hidup	984.437.000,00	322.201.500,00	(662.235.500,00)	Sumber Anggaran: 1. APBD: Rp.24.552.427.409,00
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	2.156.771.000,00	288.536.900,00	(1.868.234.100,00)	2. Danais: Rp. 216.660.000,00
3. Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	2.230.037.000,00	1.219.946.520,00	(1.010.090.480,00)	3. DiD: Rp.-
4. Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	2.369.123.250,00	973.039.900,00	(1.396.083.350,00)	
5. Program Pengelolaan Persampahan Regional	9.150.000.000,00	8.824.492.517,00	(325.507.483,00)	
6. Program Pengembangan Pembibitan Kehutanan	513.432.000,00	401.931.500,00	(111.500.500,00)	

Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
7. Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan	915.448.000,00	279.156.000,00	(636.292.000,00)	
8. Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	8.932.665.400,00	6.973.650.580,00	(1.959.014.820,00)	
9. Program Pengelolaan Hutan Konservasi	1.218.626.750,00	263.364.500,00	(955.262.250,00)	
10. Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (Danais Urusan Kebudayaan)	460.000.000,00	182.000.000,00	(278.000.000,00)	
11. Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (Danais Urusan Tata Ruang)	200.000.000,00	34.660.000,00	(165.340.000,00)	
12. Program Administrasi Perkantoran	3.639.267.750,00	2.848.775.250,00	(790.492.500,00)	
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.037.806.600,00	1.964.425.242,00	(1.073.381.358,00)	
14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	243.267.000,00	192.907.000,00	(50.360.000,00)	

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja Eselon II (outcome) tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 67,57% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi

Yogyakarta, 6 November 2020

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



[Handwritten Signature]

HAMENGGU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
DAN KEHUTANAN DIY



[Handwritten Signature]

Ir. HANANTO HADI PURNOMO, M.Sc.
NIP. 19610223 198902 1 001

- b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja Yang di Laporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja Yang di Laporkan (*Outcome*);
 - 3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memperoleh nilai sebesar 80,17 kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
 4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,71 atau 89,03% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 21,58 atau 86,32% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,05 atau 80,31% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 6,92 atau 69,17% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 12,92 atau 64,58% dari bobot sebesar 20%.
 5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 yang lalu agar memperhatikan kesesuaian Renstra dan Renja, dan lebih optimal dalam mencapai *output* dan *outcome* kegiatan yang ditargetkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah melakukan tindak lanjut berupa perubahan Renstra untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran strategis dengan RPJMD DIY.

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY beserta seluruh jajarannya agar:
- Meningkatkan kualitas evaluasi internal melalui supervisi pada pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap;
 - Mempublikasikan Laporan Kinerja pada website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
 - Terus melakukan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2019, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
dinsl=knHidp\dnKehutan

Alamat : Jalan Argulobang Nomor 19, Bacio, Yogyakarta 55225
Telepon : (0274) 588518, faksimile : (0274) 512447, Website : dlhk.jogjapro.go.id

Yogyakarta, 30 Desember 2020

Nomor : 700/36048
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Atas Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP

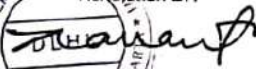
Kepada
Yth. INSPEKTUR DIY
di -
Yogyakarta

Berdasarkan surat dari Inspektorat DIY perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Nomor 700/00874 Tanggal 13 Maret 2020 terdapat penilaian, catatan dan rekomendasi, pada prinsipnya kami menerima hasil evaluasi dan penilaian tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut atas saran/rekomendasi yang disampaikan, kami melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berkomitmen untuk meningkatkan kualitas evaluasi internal melalui koordinasi pada pembahasan yang reguler dan bertahap serta meningkatkan capaian kinerja organisasi dari dokumen perencanaan yang baik, monitoring pelaksanaan program kegiatan dan evaluasi secara periodik mingguan, bulanan dan triwulanan
2. Laporan Kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah diunggah pada website sehingga dapat diakses secara luas oleh publik
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran secara lebih baik, mempergunakan data, informasi dan hasil kajian sebagai bagian dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan bersama, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dengan parameter yang terukur.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pit Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DIY


HANANTO HADI PURNOMO, M.Sc.
NIP.19610223 198902 1 001